

## KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN

Resky Amalia Desri<sup>1(a)</sup>, Jumiati<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>amaliadesri@gmail.com, <sup>b)</sup>jumiati@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

15-12-2021

Selesai Revisi:

15-04-2022

Diterbitkan Online:

18-04-2022

#### Kata Kunci:

Kinerja, Inspektorat, Pengawasan

#### Keywords:

Performance, Inspectorate, Supervision

#### Corresponding Author:

amaliadesri@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan. Terolah nya penelitian ini dengan teknik analisis secara kualitatif dengan memakai metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai dengan perolehan hasil penelitian dan pembahasan kinerja Inspektorat daerah Kabupaten solok dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dilihat dari: a) Perencanaan program pengawasan, b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, c) Pemeriksaan, pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah, masih belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan adalah lemahnya independensi, kurang memadainya sumber daya manusia, dan adanya keterbatasan tersedianya sarana dan prasarana.

### ABSTRACT

This study aims to describe the performance of the Regional Inspectorate of Solok Regency in carrying out its supervisory function, to describe the factors that affect the performance of the Solok Regency Regional Inspectorate in carrying out its supervisory function. This research was processed with qualitative analysis techniques using descriptive methods, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. In accordance with the results obtained from research and discussion of the performance of the Solok Regency Regional Inspectorate in the implementation of the supervisory function, it can be seen from: a) supervision program planning, b) policy formulation and facilitation of supervision, c) inspection, investigation and assessment of the performance of regional apparatus, which is still not optimal. The factors that affect the performance of the Solok Regency Regional Inspectorate in carrying out supervision are weak independence, inadequate human resources, and limited availability of facilities and infrastructure.



## PENDAHULUAN

Peralihan pola sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan peralihan paradigma pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai kekuasaan yang cukup luas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah nya secara otonom, seperti yang diungkapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Disebabkan adanya perpindahan kekuasaan tersebut, maka suatu daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, proses pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah merupakan bagian dari lembaga pengawasan yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dan berarti demi kesuksesan dan kemajuan pemerintah daerah guna tercapainya sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Inspektorat daerah Kabupaten Solok termasuk sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Landasan hukum yang menjadi acuan pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok yaitu bersumber (Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020, n.d.) Tentang Kedudukan Struktur Organisasi penetapan Tugas dan Fungsi juga cara Kerja Inspektorat Daerah yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah termasuk ke dalam pengawas di daerah yang ketuai secara langsung oleh Inspektur dan juga kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab ke Bupati atau Wali kota melewati Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, n.d.) mengenai Petunjuk secara Teknis dan aturan kerja Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan fungsi pengawasan, inspektorat melaksanakan kegiatan yaitu: Merencanakan program pengawasan; Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan; dan Melakukan kegiatan berupa pengusutan, pengujian, pemeriksaan dan penilaian atas pengawasan.

Namun dalam melakukan kegiatan pengawasan Inspektorat daerah belum

maksimal, berdasarkan hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tahun 2020 bahwa Inspektorat baru mencapai level 2plus kapabilitas APIP, masih tingginya angka temuan pemeriksaan, belum disiplinya aparat Inspektorat dalam menyelesaikan hasil pemeriksaan pengawasan yang seharusnya diselesaikan 60 hari semenjak pemeriksaa karna belum disiplin tersebutlah terjadinya tunggakan.

Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan di latar belakang yaitu a) Bagaimana kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi Pengawasan? b) Apa faktor-faktor mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam pelaksanaan fungsi pengawasan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian berjenis semi kualitatif menggunakan metode deskriptif. Bentuk penelitian kualitatif digunakan sesuai dengan rumusan masalah untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Tempat di laksanakan penelitian ini yaitu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Dalam memilih sumber data yang akan diwawancarai dengan beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan Fungsi Pengawasan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 mengenai Panduan Teknis dan juga cara Kerja Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, inspektorat melakukan kegiatan yaitu : Melaksanakan perencanaan program pengawasan; Melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi pengawasan dan Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Solok melaksanakan :

#### a) Perencanaan program pengawasan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2007 mengenai aturan pelaksanaan organisasi dan cara kerja Inspektorat daerah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah dengan membuat perencanaan program pengawasan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan Program yang direncanakan oleh Inspektorat berupa Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), perencanaan program tersebut dilakukan setiap tahunnya, dan akan melakukan revisi jika diperlukan. Perencanaan program pengawasan diketahui oleh Bupati sebagai kepala daerah dan dalam perencanaan program pengawasan inspektorat bekerja sama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa pihak eksternal dalam pembuatan program pengawasan tersebut.

b) Merumusan Kebijakan dan Mefasilitasi pengawasan

Inspektorat daerah Kabupaten Solok melakukan kegiatan merumusan Kebijakan dan mefasilitasi Pengawasan dengan menghasilkan sebuah aturan atau kebijakan mengenai pengawasan yang memedomani kepada kebijakan pengawasan yang sudah ada oleh pemerintah pusat ataupun provinsi yang diselaraskan dengan karakter daerah. Adanya pelaksanaan kegiatan ini bertujuan menimalisir adanya terjadi tumpang tindih terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyerentakan program kegiatan pengawasan yang bermula dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat diketahui bahwa belum adanya perencanaan kebijakan pengawasan yang direncanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok, sedangkan untuk fasilitasi pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Solok menyediakan fasilitas berupa pembinaan pengawasan, layanan konsultasi, dan menyediakan atau mendatangkan narasumber untuk pembicara pada kegiatan-kegiatan yang ada.

c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas pengawasan

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang mana Inspektorat berperan penting untuk mewujudkan visi kepala daerah melalui misi daerah yang ke-5 yaitu “menetapkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih” untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah kegiatan pengawasan prioritas. Bentuk dari kegiatan pengawasan prioritas oleh Inspektorat Daerah ada 2 kegiatan, yaitu : 1) kegiatan pengawasan internal secara umum

yang berada di lingkungan pemerintahan daerah yang terdiri dari audit operasional, audit tujuan tertentu, audit kinerja, pengusutan (reviu), evaluasi laporan kinerja perangkat daerah, dan kegiatan pengawasan serupa lainnya. 2) Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Kegiatan nya berupa penataan revormasi birokrasi, pemantauan lanjut hasil dari pengawasan, dan pengawasan perihal pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan kegiatan pengawasan prioritas yang dilakukan oleh Inspektorat daerah sudah terlaksana sepenuhnya namun dalam menindaklanjuti hasil dari pengawasannya belum maksimal, dikarenakan masih minimnya komitmen dari objek pemeriksaan terhadap kewajiban dalam menyudahkan hasil tindak lanjut pemeriksaan, sehingga banyak sisa pekerjaan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) tahun sebelumnya danditambah tahun berjalan yang belum diselesaikan. Seharusnya Inspektorat daerah Kabupaten Solok lebih komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang seharusnya sudah selesai sebelum 60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diperoleh. Selain itu terdapat temuan hasil pemeriksaan yang sulit/tidak dapat ditindak lanjuti, baik disebabkan oleh cacat rekomendasi, rekomendasi yang tidak memadai dan sebab lainnya yang tidak mungkin untuk menindaklanjutinya.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan Fungsi Pengawasan**

1) Lemahnya Independensi

Sesuai dengan pendapat Dewan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) melalui (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengungkapkan bahwasanya : “pengaudit diwajibkan memiliki pendirian independen, artinya disini pengaudit sulit terpengaruh, dikarenakan pengaudit telah melakukan tugasnya yang bertujuan kepentingan umum (adanya perbedaan jika pengaudit melaksanakan menjadi pengaudit intern).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa Independensi yang ada Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan masih dalam keadaan tidak berlangsung seefektif mungkin, keadaan ini bisa dilihat dalam peraturan bupati

Solok nomor 32 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Inspektorat termasuk dalam bagian pengawasan yang melaksanakan pengawasan di pemerintahan daerah, diketuai oleh Inspektur sebagaimana melakukan tugas langsung berwenang kepada bupati dan secara administratif memperoleh penyempurnaan oleh sekretaris daerah.

## 2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ujung tombak untuk melaksanakan pengawasan salah satunya kemampuan sumber daya manusia yang tersedia, dengan adanya profesionalisme dari sumber daya manusia akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bernadin dan Russel (1993: 379) menyatakan bahwasanya “Kinerja menjadi bagian akibat dari prestasi kerja yang telah didapatkan oleh karyawan atau seseorang sesuai dengan tugas yang sudah dilaksanakan dan fungsinya yang ada pada periode tertentu”. Keberadaan Sumber daya manusia yang telah memiliki keahlian, keterampilan dan juga kompetensi pada bidang pengawasan termasuk kepada indikator keberhasilan kinerja oleh Inspektorat daerah dalam melaksanakan semua fungsi pengawasan hingga aparat pengawas diharapkan untuk bisa bekerja tepat waktu.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat daerah Kabupaten Solok jumlahnya terbatas, khususnya sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor yang bersangkutan telah memiliki kemampuan khususnya bidang pengawasan. Selain itu ada ketidaksetaraan jumlah antara jabatan fungsional auditor dibandingkan dengan pengawasan yang dilaksanakan. Terjadinya keterbatasan ataupun kurangnya sumber daya manusia disebabkan oleh pelaksanaan proses perekrutan pegawai di lingkungan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Solok masih berantakan sehingga kualifikasi untuk aparat pengawas tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan

## 3) Sarana dan Prasarana Penunjang

Sudah adanya sarana dan prasarana yang memadai disamping itu mempunyai kualitas bagus juga sangat diperlukan untuk setiap organisasi manapun dalam rangka melaksanakan setiap kegiatan untuk tercapai sesuai keinginan yang diharapkan. Menurut (Moenir, 2014) sarana merupakan semua jenis

kelengkapan yang berguna sebagai alat utama yang digunakan secara langsung agar sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan, sedangkan prasarana adalah alat yang digunakan secara tidak langsung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana ataupun prasarana juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat daerah Kabupaten Solok belum sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai penunjang proses pengawasan dan belum memadainya sarana mobilitas melaksanakan pengawasan, hal ini dikarenakan luasnya jangkauan kegiatan pengawasan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh mengenai Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melaksanakan Pengawasan dapat diambil kesimpulan, yaitu Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pengawasan selama periode anggaran tahun 2020 masih belum sepenuhnya optimal masih ada beberapa hal yang perlu di optimalkan lagi dalam meningkatkan kinerjanya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok berupa perencanaan pengawasan, memfasilitasi pengawasan juga melakukan pemeriksaan berupa mengusus, menguji dan penilaian atas pengawasan.

Sekalipun faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pengawasan yakni masih terbatasnya keberadaan sumber daya pengaudit dalam jumlah kuantitas maupun terhadap kualitas, dan juga masih belum ditetapkannya Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan sokongan dari bentuk tata sistem organisasi yang belum kuat. Teruntuk pada lemahnya sistem tata kerja organisasi, hal ini akan berdampak buruk pada independensi pengawasan, dan juga ketersediaan prasarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti memperoleh hasil penelitian dan memberikan saran kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pengawasan yaitu: Dibutuhkan adanya regulasi atau Undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan sistem tata kerja organisasi lembaga kepengawasan internal dengan objek yang diawasi, hingga bisa menanggung kewajiban atas Independensi

Inspektorat Daerah untuk menyelenggarakan proses pemeriksaan ataupun pengawasan terhadap objek pemeriksaan secara maksimal dan optimal.

Selain itu dibuktikan adanya kesungguhan, kerja keras dan juga komitmen dari aparatur yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan maksimal. Disertai adanya penambahan aparatur pengawas, selain itu ketersediaan sumberdaya manusia yang cukup dan memadai akan mempercepat terlaksananya penetapan jabatan Fungsional Auditor dalam struktur organisasi Inspektorat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S. (1990). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). Standar profesional akuntan publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu Edisi 3. In *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL."*
- Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*.
- Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007.
- Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
- Sedarmayanti. (2016). Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama. In *Refika Aditama*.
- Tsauri, S. (2014). MANAJEMEN KINERJA Performance Management. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.